



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Jakarta III

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Berpedoman pada peraturan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Tahun 2024.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, telah mendorong DJKN untuk menerapkan sistem *Balance Scorecard Card (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. Kinerja KPKNL Jakarta III dinilai berdasarkan IKU yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Jakarta III Tahun 2024.

Laporan capaian kinerja tahun 2024 KPKNL Jakarta III menyajikan hasil pencapaian terhadap 11 (sebelas) Sasaran Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 sebesar 116,83%. Hasil capaian tersebut tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk semakin lebih baik lagi di tahun berikutnya.

Dengan slogan “Santun, Tertib, Amanah, Responsif (STAR)” dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, serta budaya kerja sesuai Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, AKuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan dan bermanfaat bagi pengguna jasa.

Umpan balik berupa kritik dan saran yang membangun dari para pengguna jasa sangat dibutuhkan sebagai bahan refleksi bagi kami untuk terus berbenah dalam memberikan layanan yang prima.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III dalam mengelola kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan penilaian, dan pelayanan lelang disampaikan kepada *stakeholders* melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Jakarta III Tahun 2024. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, LAKIN KPKNL Jakarta III Tahun 2024 merupakan bahan monitoring dan evaluasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN yaitu:

"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Jakarta III memiliki 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta III menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.

7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang.
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil Lelang.
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta III. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Jakarta III Tahun 2024, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU dengan capaian 116,83% sebagai berikut:

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (30%)			33,35%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan			111,18%
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	112,19%	112,19%
1b-CP	Indeks integritas	89,17	92,44	103,67%
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	133,27%	120,00%
	Customer Perspective (20%)			23,61%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			114,15%
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	72%	87%	120,00%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	87%	94%	108,30%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal			120,00%
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	137,81%	120,00%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	527,06%	120,00%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien			120,00%
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	75	92,89	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)			30,00%
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif			120,00%
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	126%	120,00%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	173,00%	120,00%
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100	120	120,00%
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif			120,00%
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	68%	53,97%	120,00%

6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	112,36%	120,00%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0,94%	120,00%
	Learning & Growth Perspective (25%)			29,87%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			117,94%
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	126,10%	120,00%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85,00	98,49	115,87%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00%
9a-CP	Indeksi kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120,00	120,00%
9b-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0,00%	120,00%
10	Komunikasi publik yang efektif			120,00%
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	112,00	120,00%
11	Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah			120,00%
11a-N	Indeks efektivitas UKI	82	99,06	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				116,83%

Dalam proses pencapaian kinerja selama tahun 2024, tentunya KPKNL Jakarta III tidak terlepas dari berbagai hambatan yang harus dihadapi. Namun demikian, berlandaskan pada semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, seluruh pegawai KPKNL Jakarta III telah berkomitmen untuk selalu mengupayakan yang terbaik dan optimistis dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selanjutnya, di masa yang akan datang diharapkan semua capaian sasaran strategis dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan lebih baik dari tahun 2024.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan	ii
Eksekutif	
Daftar Isi	vi

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Penjelasan Umum Organisasi	1
	B. Aspek Strategis Organisasi	4
	C. Sistematika Laporan	7
	D. Isu Strategis Organisasi	8

BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
	B. Penetapan Perjanjian Kinerja	13
	C. Addendum Perjanjian Kinerja	15

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	17
	B. Kinerja Lainnya	48
	C. Realisasi Anggaran	54

BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan Umum	55
	B. Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun Mendatang	55

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

ADDENDUM PERJANJIAN KINERJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta (KPKNL) III beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 adalah unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disebutkan bahwa KPKNL merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta. Sebagai unit instansi vertikal, KPKNL melaksanakan tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta III mempunyai fungsi sebagai berikut:

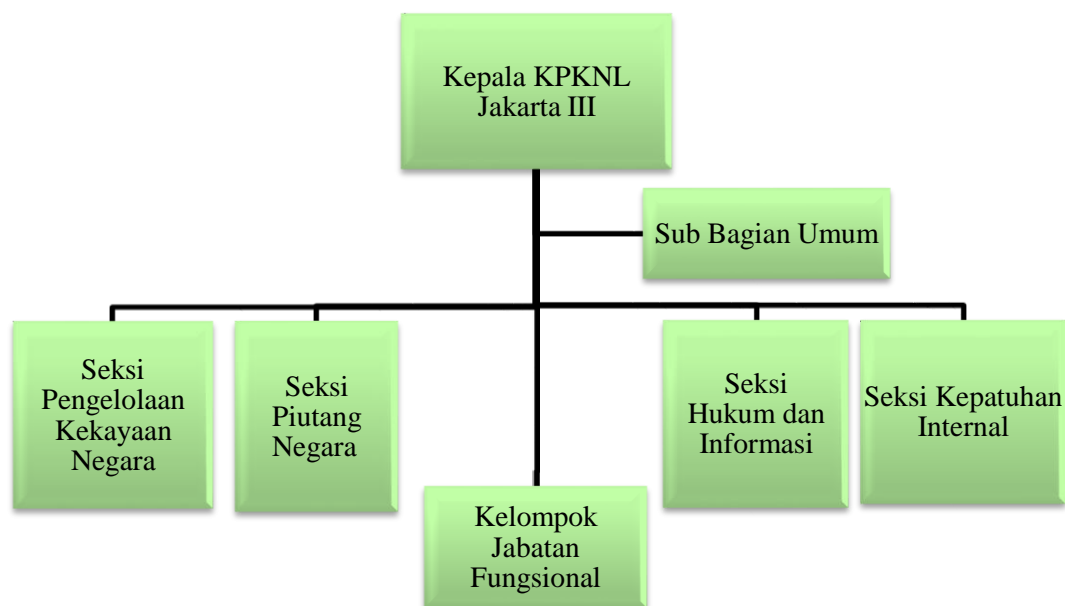
1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang.
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan

lelang.

8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

KPKNL Jakarta III dipimpin oleh Kepala Kantor yang merupakan Pejabat Eselon III dan terdiri dari 5 (lima seksi) serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

Struktur Organisasi KPKNL Jakarta III



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Jakarta III didukung oleh 41 (empat puluh satu) orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut.

Komposisi Pegawai berdasarkan Gender dan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total Pegawai
1.	I	-	-	-
2.	II	2	3	5
3.	III	20	11	31
4.	IV	4	1	5
Total Pegawai		26	15	41

Data Kepegawaian per 31 Desember 2024

Komposisi Pegawai berdasarkan Usia dan Golongan

No	Kelompok Umur	Golongan Ruang				Total Pegawai
		I	II	III	IV	
1.	18 - 30	-	4	-	-	4
2.	31 - 40	-	-	13	-	13
3.	41 - 50	-	-	15	3	18
4.	di atas 50	-	1	3	2	6
Total		-	5	31	5	41

Data Kepegawaian per 31 Desember 2024

Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Total Pegawai
		I	II	III	IV	
1.	SMA	-	1	1	-	2
2.	DI	-	-	-	-	-
3.	DIII	-	2	3	-	5
4.	DIV/S1	-	2	22	1	25
5.	S2	-	-	5	4	9
6.	S3	-	-	-	-	-
Total		-	5	31	5	41

Data Kepegawaian per 31 Desember 2024

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Total Pegawai
1.	Pelelang Ahli Madya	2
2.	Pelelang Ahli Muda	4
3.	Pelelang Ahli Pertama	1
4.	Penilai Pemerintah Ahli Muda	2
5.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	2
6.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
Total Pegawai		12

Data Kepegawaian per 31 Desember 2024

B. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta III memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta III turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan dayaguna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Jakarta III selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Jakarta III senantiasa mendorong Kementerian/Lembaga untuk melakukan 3T dalam pengelolaan BMN, yaitu Tertib Adminstrasi, Tertib Hukum, dan Tertib Fisik. Terlebih dengan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan BMN, maka DJKN dituntut untuk dapat menjadi *distinguished asset manager*. Hal tersebut berarti sebuah tantangan untuk menjadi *asset manager* yang disegani dan dihormati dalam efektifitas dan produktifitas yang kemudian betul-betul bisa mengelola aset menjadi bermanfaat baik dari sisi ekonomi, sosial dan juga finansial. Pengelolaan BMN didorong agar mampu berperan dalam mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja dan pembiayaan APBN serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional.

2. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN

perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada DJKN cq. Panitia Urusan Piutang Negara. Begitupun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, maka fokus pengurusan piutang negara difokuskan kepada penyerahan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

Selain itu, berkaitan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian atau Seluruhnya Dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan SE-1/KN/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pengurusan Piutang Penyerahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka sepanjang tahun 2024 KPKNL Jakarta III telah memproses pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara kepada penyerah piutang BUMN/BUMD.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta III secara konsisten dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara. Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan biaya yang dipungut oleh PUPN atas layanan pengurusan piutang negara pada saat penanggung utang melakukan angsuran/pelunasan. Selain itu, dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Jakarta III memungut Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

4. Kepatuhan Internal

Unit Kepatuhan Internal merupakan unit khusus pada KPKNL Jakarta III yang berperan dalam pemantauan atas fungsi pengendalian internal. Pada KPKNL Jakarta III memiliki Seksi Kepatuhan Internal yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Oleh karena itu adanya seksi kepatuhan internal sangat berpengaruh dalam mendorong penyelesaian masalah secara cepat dan terbuka dan mengantisipasi kesalahan yang semakin besar dan berulang karena menjadi

bagian dari manajemen unit kerja.

5. Hukum dan Informasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta III juga menghadapi permasalahan-permasalahan hukum. Dalam upaya penegakan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi lelang atau sita kadang kala harus beririsan dengan kepentingan beberapa pihak yang tidak patuh atau masih berupaya menempuh jalur hukum. Disinilah peran Seksi Hukum dan Informasi yang Seksi Hukum dan Informasi bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum. Selain memberikan pelayanan di bidang hukum, Seksi Hukum dan Informasi berperan dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, terdapat tugas berupa pengawasan terhadap implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat melalui penyusunan berita, pengelolaan media sosial, penyebaran informasi melalui berbagai media grafis, fotografi, maupun videografi.

6. Memberikan Pelayanan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian Barang Milik Negara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Hasil penilaian Barang Milik Negara tersebut antara lain akan digunakan dalam penyesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dapat digunakan sebagai dasar tersedianya *underlying aset* sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Selain itu, penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan negara, menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

7. Memberikan Pelayanan Lelang

Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum dan terbuka, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang juga dapat dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan.

Lelang mempunyai nilai manfaat lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu antara lain lebih transparan, akuntabel, efisien dan menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar masyarakat memandang lelang sebagai suatu alternatif pelaksanaan jual beli yang aman dan menguntungkan.

Disamping itu, lelang dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tahun 2024, KPKNL Jakarta III juga turut berperan dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional melalui pelaksanaan lelang produk-produk UMKM. Hal ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi dan mendukung UMKM untuk bertahan di tengah pandemi. Jangkauan pemasaran lelang melalui lelang indonesia portal.lelang.go.id atau lelang.go.id dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

C. Sistematika Laporan

Dalam rangka memudahkan penyajian dan pemahaman terhadap isi laporan, maka laporan ini disusun menggunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi
4. Bab I Pendahuluan
5. Bab II Perencanaan Kinerja
6. Bab III Akuntabilitas Kinerja
7. Bab IV Penutup
8. Lampiran

D. Isu Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2024, KPKNL Jakarta III mengalami beberapa permasalahan utama, diantaranya:

1. Tanah yang diajukan dalam objek sertifikasi BMN tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen persyaratan yang diperlukan dalam proses sertifikasi tidak dilengkapi oleh satker pemohon.
2. Terbatasnya informasi terkait objek yang belum memiliki persetujuan sewa untuk dilakukan wasdal.
3. Belum meratanya pengetahuan satker terkait penerapan SIMAN v.2 yang optimal digunakan pada Oktober 2024.
4. BMN yang saat revaluasi tidak ditemukan dan termuat pada BA 06 tetap diusulkan pada target SBSK.
5. Terdapat perlawanan dari pihak tereksekusi lelang.
6. Nilai limit pasar objek lelang yang dinilai kurang menarik minat masyarakat.
7. Objek lelang masih berpenghuni.
8. Jumlah *outstanding* BKPN KPKNL Jakarta III.
9. Objek sita atas barang jaminan belum laku terlelang.
10. Berkurangnya jumlah SDM pada Fungsional Penilai akibat mutasi yang tidak diimbangi dengan penambahan Fungsional Penilai yang masuk.

Terhadap permasalahan tersebut, tindak lanjut yang telah dilaksanakan KPKNL Jakarta III diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan satker dan kantor pertanahan guna mempercepat proses sertifikasi dan diadakannya rapat triwulanan untuk membahas kendala dan mencari solusi antara Kanwil BPN, Kanwil DJKN DKI Jakarta, BPN, KPKNL, serta satker yang memiliki target sertifikasi.
2. Melakukan koordinasi dengan satker dan mendorong satker untuk mengajukan permohonan sewa.
3. Menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi serta menjadi narasumber pada sosialisasi yang diinisiasi oleh satker.
4. Mengajukan revisi target berjenjang dari KPKNL, Kanwil, dan Kantor Pusat guna menyesuaikan target SBSK.
5. Mitigasi risiko dengan cara memastikan legalitas formal objek lelang terpenuhi.
6. Melakukan koordinasi dengan Pemohon Lelang untuk mengajukan objek lelang yang potensial.
7. Edukasi terhadap Pemenang Lelang terkait langkah-langkah pasca lelang.

8. Melakukan upaya penagihan atas BKPN transfer dari KPKNL Jakarta II yang berasal dari Dit. PKKN yang memiliki potensi untuk penurunan outstanding PN, peningkatan tahapan pengurusan piutang negara sampai pada tahap PSBDT untuk BPKN yang tidak memiliki barang jaminan, dan peningkatan tahapan pengurusan piutang negara untuk berkas yang jaminannya sudah dilakukan penyitaan berupa penilaian barang jaminan agar dapat dilakukan penjualan secara lelang.
9. Pengajuan lelang kembali terhadap objek sita atas barang jaminan yang belum laku terlelang .
10. Memaksimalkan SDM yang ada dan memohon perbantuan dari seksi/unit lain.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Iktisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Jakarta III memiliki visi yaitu:

‘Menjadi Kantor Pelayanan terbaik di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang’.

Visi dimaksud merupakan kristalisasi sekaligus semangat yang menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Jakarta III dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selanjutnya, untuk merealisasikan visi tingkat KPKNL Jakarta III tersebut, KPKNL III mempunyai misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mewujudkan tercapainya misi DJKN.
2. Mewujudkan pelayanan teladan yang berorientasi pada kepuasan stakeholder/masyarakat pengguna jasa.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) KPKNL Jakarta III adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi pengguna jasa.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta III, yaitu :

1. Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat guna dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan kualitas pengurusan piutang negara.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan penilaian.
5. Meningkatkan pelayanan bantuan hukum dan informasi.
6. Meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian dan umum.
7. Meningkatkan pelayanan di bidang keuangan.

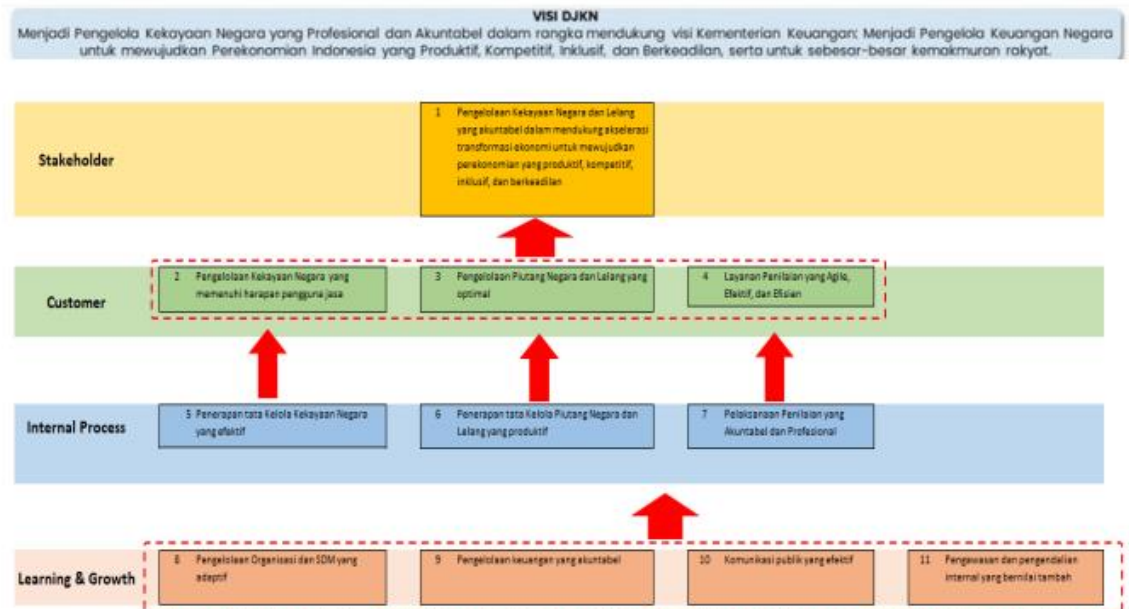
Pada dasarnya sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Sasaran yang hendak dicapai KPKNL Jakarta III meliputi:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal.
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien.
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif.
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif.
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif.
9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.
10. Komunikasi Publik yang Efektif.
11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah.

Sasaran yang hendak tercapai tersebut, tergambar dalam peta strategi KPKNL Jakarta III Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta III. Peta Strategi KPKNL Jakarta III Tahun 2024 memuat 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. *Stakeholder Perspective*, dengan satu sasaran berupa Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.
2. *Customer Perspective*, dengan tiga sasaran berupa Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal , dan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dan Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien.
3. *Internal Process Perspective*, dengan tiga sasaran berupa Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif, Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif, dan Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.
4. *Learning & Growth Perspective*, dengan empat sasaran berupa Pengelolaan

Organisasi dan SDM yang Adaptif, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Komunikasi Publik yang Efektif, dan Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah.



Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta III melaksanakan program yaitu:

1. Peningkatan penerimaan negara dari pengelolaan BMN dan lelang (PNBP).
2. Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif.
3. Pengelolaan Aset.
4. Melaksanakan percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN dan upaya peningkatan kontribusi penerimaan negara terhadap perekonomian sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi yaitu dengan memberikan keringanan utang.
5. Optimalisasi Lelang Online dan Permohonan Lelang Online.
6. Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada SOP.
7. Optimalisasi Satu Kemenkeu dalam tata persuratan.
8. Sapa Pagi yang dilaksanakan sebagai media pengarahan pimpinan dan rencana kerja setiap pekan bagi pegawai KPKNL Jakarta III.
9. Usulan Pegawai KPKNL Jakarta III untuk mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

B. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Jakarta III Tahun 2023/24 dijabarkan dalam 11 Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui penetapan 20 target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
	Indeks integritas	89,17
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	72%
	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	87%

Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100%
	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%
Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	75
Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle	100
Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	68%
	Persentase produktivitas lelang	89%
Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja anggaran	100
	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10%
Komunikasi publik yang efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82

C. Addendum Perjanjian Kinerja

KPKNL Jakarta III selama tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) kali addendum perjanjian kinerja, yaitu Nomor PK-03A/WKN.07/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan PK-03B/WKN.07/2024 tanggal 18 November 2024.

1. Addendum Perjanjian Kinerja Nomor PK-03A/WKN.07/2024

a. Perubahan Indikator Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
1.	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100	5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle	100
2.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100

b. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
1c-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1c-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan	30	50	50	60	60	71,5	71,5

	BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan									BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	45	45	-	45	86,5	86,5	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	10	45	45	60	60	86,5	86,5
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100	5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	88	88	100	100
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90	8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45	60	60	80	80	90	90
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82

2. Addendum Perjanjian Kinerja Nomor PK-03B/WKN.07/2024

a. Perubahan Indikator Utama

		Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target	
3	Pengelolaan Putang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (700 M)	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (716,4 M)
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase saldo BKP	68 (2.221 Berkas)*	6a-CP	Persentase saldo BKP	68 (2.207 Berkas)

*)Catatan: Berdasarkan PK-03/WKN.07/2024 dan PK-03A/WKN.07/2024 raw data target saldo BKP adalah 2.221 BKP, sedangkan pada ND Sesditjen Nomor ND-4213/KN.1/2024 adalah 2.207 BKP.

b. Perubahan Rincian Target Kinerja

		Sebelum							Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Setelah dilakukan adendum, KPKNL Jakarta III memiliki 11 (sebelas) Sasaran Startegis yang dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh hasil akhir capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III sebesar 116,83% (seratus enam belas koma delapan puluh tiga persen), dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 KPKNL Jakarta III

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (30%)	30%				33,35%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan					111,18%
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/L	100%	112,19%	112,19%	112,19%
1b-CP	Indeks integritas	P/L	89,17	92,44	103,67%	103,67%
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	133,27%	133,27%	120,00%
	Customer Perspective (20%)	20%				23,61%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					114,15%
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/L	72%	87%	121,79%	120,00%

2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	P/L	87%	94%	108,30%	108,30%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal					120,00%
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	137,81%	137,81%	120,00%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	P/M	100%	527,06%	527,06%	120,00%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien					120,00%
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	P/M	75	92,89	123,85%	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)	25%				30,00%
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif					120,00%
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%	126%	126,19%	120,00%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%	173,00%	173,00%	120,00%
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	P/M	100	120	120,00%	120,00%
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif					120,00%
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	68%	53,97%	121,12%	120,00%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89%	112,36%	126,25%	120,00%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					120,00%
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	16%	0,94%	194,13%	120,00%
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%				29,87%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					117,94%
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	90%	126,10%	140,11%	120,00%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	85,00	98,49	115,87%	115,87%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel					120,00%
9a-CP	Indeksi kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	120,00	120,00%	120,00%
9b-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	200,00%	120,00%
10	Komunikasi publik yang efektif					120,00%

10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80	112,00	140,00%	120,00%
11	Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah					120,00%
11a-N	Indeks efektivitas UKI	P/M	82	99,06	120,80%	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						116,83%

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) yang terinci dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian IKU dan kegagalan capaian IKU dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang berhasil dicapai.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

a. IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan (1a-CP)

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders.

Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan KPKNL Jakarta III terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)

3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023.

KPKNL Jakarta III pada tahun 2024 memperoleh capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan sebesar 112% dari target sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut.

Capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.							
	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	27,78%	83,33%	83,33%	100%	100%	112,19%	112,19%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	112%	112%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Tahun	Target					Realisasi	Capaian
	PK	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional		
2024	100%	4,20 (skala 5)	4,20 (skala 5)	4,20 (skala 5)	-	112,9%	112,9%
2023	100%	4,15 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,15 (skala 5)	-	106,4%	106,4%
2022	4,65	4,10 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,10 (skala 5)	-	4,72	101,51%
2021	4,65	4,05 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,05 (skala 5)	-	4,65	100%
2020	4,67	4 (skala 5)	4 (skala 5)	-	-	4,67	100%

Terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Penetapan target kepuasan stakeholder dan pengguna layanan dari tahun 2020 s.d. 2023 selalu tercapai. Hal ini menandakan semakin meningkatnya kepuasan pengguna layanan KPKNL Jakarta III terhadap layanan yang diberikan kepada stakeholder di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan penilaian, dan lelang.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan stakeholder dan pengguna layanan dimaksud, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi serta responsif atas pengaduan/keluhan dari pengguna jasa dengan tetap mengacu pada peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.

b. IKU Indeks Integritas (1b-CP)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Pada IKU ini, realisasi KPKNL Jakarta III sebesar 89,17 dari target 92,44 sehingga indeks integritas mencapai 104%.

Capaian IKU Indeks Integritas

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10	20	20	30	30	89,17	89,17	
Realisasi	10	20	20	42	42	92,44	92,44	
Capaian	100%	100%	100%	120%	120%	104%	104%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Indeks Integritas

Tahun	Target					Realisasi	Capaian
	PK	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional		
2024	89,17	92 (skala 100)	92 (skala 100)	92	-	92,44	103,67%
2023	88,67	91,5 (skala 100)	91,5 (skala 100)	91,5	-	89,17	100,56%
2022	-	91 (skala 100)	91 (skala 100)	91	-	-	-
2021	-	90,5 (skala 100)	90,5 (skala 100)	90,5	-	-	-
2020	-	90 (skala 100)	90 (skala 100)	-	-	-	-

Terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

IKU Indeks Integritas merupakan IKU yang baru ada di tahun 2023. Capaian IKU ini mengalami peningkatan dari tahun 2023, dari 100,56% menjadi 103,67%.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan Indeks Integritas dapat berupa menjadikan sosialisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan kode etik ASN yang pengawasan internal dan eksternal yang ketat, dan penerapan sanksi pelanggaran yang sesuai.

c. **IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1c-CP)**

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang.

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara, sementara nilai pengurusan piutang negara

berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. PNBP Lelang yaitu Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian, bea lelang batal atas permintaan penjual, biaya permohonan lelang, uang jaminan pembeli wanprestasi, dan penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Adapun capaian Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yaitu sebesar Rp112.076.861.688,00 atau 120% dari target sebesar Rp84.100.000.000,00. Capaian tersebut berasal dari PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp73.749.687.848,00, PNBP Piutang Negara sebesar Rp957.260.766,00, dan PNBP Lelang sebesar Rp37.369.913.000,00.

Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Nama Unit	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.							
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	101,10%	116,36%	116,36%	116,02%	116,02%	133,27%	133,27%	
Capaian	101,10%	116,36%	116,36%	116,02%	116,02%	120%	120%	

Isu Utama dan Implikasi	
- Capaian s.d. Triwulan IV adalah sebesar	Rp. 112.076.861.688
PNBP Pengelolaan BMN sebesar	Rp73.749.687.848
PNBP Piutang Negara sebesar	Rp. 957.260.766
PNBP Lelang sebesar	Rp37.369.913.074
Target Triwulan IV (Q4) sebesar	Rp 84.100.000.000
PNBP Pengelolaan BMN sebesar	Rp. 51.300.000.000
PNBP Piutang Negara sebesar	Rp. 4.000.000.000
PNBP Lelang sebesar	Rp. 28.800.000.000
Keterangan :	
PNBP Pengelolaan BMN tercapai target sebesar 144%	(hijau)
PNBP Piutang Negara tercapai target sebesar 24%	(merah)
PNBP Lelang tercapai target sebesar 130%	(hijau)

Dalam hal penetapan target Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada KPKNL Jakarta III, dalam periode tahun 2020 s.d. 2024 selalu mengalami kenaikan dan capaian yang diperoleh lebih dari 100%. Adapun rinciannya ada pada tabel berikut:

**Realisasi dan Capaian Kinerja
IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
Tahun 2020 s.d. 2024**

KPKNL Jakarta III	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	35.171.824.224 (100%)	43.448.000.000 (100%)	59.812.000.000 (100%)	71.578.086.218 (100%)	84.100.000.000 (100%)
Realisasi	36.019.332.734 (102,41%)	71.253.376.303 (164%)	98.941.607.950 (165,42%)	82.007.149.969 (114,57%)	112.076.861.688 (133,27%)
Capaian	102,41%	120%	120%	114,57%	120%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

**IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	100	-	-	-	-	133,27	120
2023	100	-	-	-	-	114,57	114,57
2022	100	-	-	-	-	165,42	120
2021	100	-	-	-	-	164	120
2020	100	-	-	-	-	102,41	102,41

IKU ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis DJKN 2020-2024 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU tersebut diantaranya penyampaian Surat Paksa dan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang serta melakukan pemberitahuan *crash* program keringanan hutang kepada debitur, mempercepat pelayanan permohonan lelang online, serta mempercepat proses lelang.

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (2a-CP)

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara. Objek dari IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK adalah Tanah, Bangunan Gedung Kantor, Rumah Negara pada Satker Kementerian/Lembaga untuk wilayah KPKNL Jakarta III

Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 71,5% dengan realisasi sebesar 87% dengan capaian 120% dengan rincian sebagai berikut:

Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Nama Unit	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	50%	50%	80%	80%	71,5%	71,5%	
Realisasi	30%	92%	92%	91,78%	91,78%	87%	87%	
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	42	70	70	70	-	87	120
2023	68	65	65	65	-	73,15	107,57
2022	65	60	60	60	-	79,72	122,65
2021	62	57	57	57	-	77,52	120
2020	100	55	55	-	-	100	100

Terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini diantaranya dengan melakukan koordinasi ke Satker dan melakukan bimbingan teknis pengisian form SBSK.

b. IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN (2b-CP)

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi.

Perhitungan Capaian IKU berdasarkan kertas kerja IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN dan/atau dokumen dukung tindak lanjut yang direkam pada aplikasi SIMAN.

Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 71,5% dengan realisasi sebesar 87% dengan capaian 120% dengan rincian sebagai berikut:

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Nama Unit	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	45%	45%	80%	80%	86,5%	86,5%	
Realisasi	10%	80%	80%	75%	75%	93,68%	93,68%	
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	108%	108%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

**IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut
Persetujuan Pengelolaan BMN**

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	87	-	80	-	-	94	108,30
2023	86	-	80	-	-	90,66	105,42
2022	85	-	75	-	-	87,94	103,46
2021	85	-	75	-	-	85,80	100,94
2020	80	-	70	-	-	82,31	102,89

Terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Renstra Kemenkeu, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini diantaranya berkoordinasi dengan satuan kerja yang belum menyampaikan laporan pemanfaatan dan penjualan BMN.

3. Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

a. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (3a-CP)

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Tujuannya adalah supaya lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel,

efisien, dan efektif.

Pada tahun 2024 capaian IKU sebesar Rp987.330.711.544,00 dengan rincian pokok lelang PL Kelas I sebesar Rp864.247.996.244 dan pokok lelang pengadaan sebesar Rp123.082.715.300,00 dari target sebesar 716.433.500.000,00.

Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Nama Unit	Pengelolaan Putang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	79,80%	93,11%	93,11%	138%	138%	137,81%	137,81%	
Capaian	79,80%	93,11%	93,11%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	100	-	100	-	-	137,81	120
2023	100	-	100	-	-	130,54	120
2022	100	-	100	-	-	182,07	120
2021	100	-	100	-	-	216,88	120
2020	100	-	100	-	-	46,65	46,65

Terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Renstra Kemenkeu, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini diantaranya mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui lelang.go.id, berperan serta aktif dalam memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan lelang kepada masyarakat luas serta melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait objek lelang yang memiliki potensi laku terjual.

b. IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (3b-CP)

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKNP (nilai saldo piutang negara).

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKNP yang ada pada aplikasi FocusPN. Tujuan IKU ini yaitu Percepatan penyelesaian outstanding piutang negara.

KPKNL Jakarta III pada tahun 2024 memiliki target sebesar Rp600.000.000.000,00 dan berhasil memperoleh capaian sebesar Rp3.162.386.110.560,00 (20%) dengan rincian berasal dari angsuran/pelunasan sebesar Rp 9.681.169.457,00, PSBDT sebesar Rp73.745.414.322,00, pengembalian sebesar Rp3.077.497.833.420,00, keringanan hutang sebesar Rp1.361.381.361,00, dan koreksi data sebesar Rp100.312.000,00.

Capaian Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Nama Unit	Pengelolaan Putang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	4,79%	2,80%	2,80%	19%	19%	527%	527%	
Capaian	4,79%	2,80%	2,80%	19%	19%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	100	-	-	-	-	527,06	120
2023	100	-	-	-	-	100,12	100,12
2022	100	-	-	-	-	121,26	120
2021	100	-	-	-	-	211	120
2020	3	-	-	-	-	0,01	0,27

IKU ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis DJKN 2020-2024 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Action plan dalam mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu menyampaikan surat paksa dan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang, serta melakukan optimalisasi pengurusan piutang negara.

4. Sasaran Strategis 4: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien.

a. IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian (4a-CP)

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesainya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada.

Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian

Nama Unit	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien							
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	
Realisasi	88,01	94,18	94,18	89,4	89,4	92,89	92,89	
Capaian	114%	120%	120%	119%	119%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian

Tahun	Target					Realisasi	Capaian
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional		
2024	75	-	-	-	-	92,89	120%
2023	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-

IKU ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis DJKN 2020-2024 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Action plan dalam mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu mengoptimalkan pelayanan penilaian kepada pengguna jasa.

5. Sasaran Strategis 5: Penetapan Tata kelola Kekayaan Negara yang Efektif

a. IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan (5a-CP)

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah dengan tugas/kewajiban BPN, K/L dan DJKN.

Berdasarkan penetapan target dari Kantor Pusat sesuai lampiran ND-840/KN.1/2024 tanggal 28 Februari 2024, disampaikan bahwa target sertifikasi KPKNL Jakarta III sebanyak 126 NUP. Realisasi tahun 2024 telah tercapai 159 NUP atau sebesar 126% dari target tahun 2024 sebanyak 126 NUP, sehingga capaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan KPKNL Jakarta III tahun 2024 sebesar 120%.

**Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara
berupa Tanah yang Disertipikatkan**

Nama Unit	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	20%	56,35%	56,35%	66%	66%	126%	126%	
Capaian	100%	120%	120%	110%	110%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	100	-	100	-	-	126	120
2023	100	-	100	-	-	122,89	120
2022	100	-	100	-	-	130,77	120
2021	100	-	100	-	-	81,71	81,71
2020	-	-	100	-	-	-	-

Terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Renstra Kemenkeu 2020-2024, Renja Kemenkeu 2020-2024, dan Standar Nasional, tidak terdapat standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Action plan dalam mempertahankan dan meningkatkan IKU ini diantaranya menjalin kerjasama yang solid dengan satker dan kantar guna mempercepat proses pensertipikatan dan mengadakan rapat triwulanan yang dihadiri Kanwil BPN, Kantah, Kanwil DJKN, KPKNL serta Satker Pemohon untuk membahas kendala dan solusi.

b. IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (5b-CP)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Berdasarkan penetapan target dari Kantor Pusat sesuai ND-804/KN.1/2024 tanggal 28 Februari 2024, target evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) KPKNL Jakarta III adalah sisa target tahun 2023 yaitu sebanyak 87 NUP. Realisasi tahun 2024 telah tercapai sebanyak 115 NUP atau sebanyak 173% dari total target sebanyak 87 NUP, sehingga capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) KPKNL Jakarta Tahun 2024 sebesar 120%.

Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Nama Unit	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	17%	44%	44%	92%	92%	173%	173%	
Capaian	120%	120%	120%	115%	115%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	100	-	-	-	-	173	120
2023	100	-	-	-	-	125,57	120
2022	100	-	-	-	-	100	100
2021	100	-	-	-	-	100	100
2020	100	-	-	-	-	100	100

IKU ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis DJKN 2020-2024 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat

diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu tetap terus berkoordinasi dengan satuan kerjadan melaksanakan survei lapangan terhadap BMN yang belum dilakukan survei.

c. IKU Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle (5c-N)

Barang Milik Negara (BMN) eks BMN idle adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (BMN idle), yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Selanjutnya, Inventarisasi BMN eks BMN Idle, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Inventarisasi BMN Idle di Pengelola Barang, merupakan kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan terhadap hasil pendataan BMN eks BMN Idle guna menghasilkan Daftar Barang Pengelola yang akuntabel dan akurat. Inventarisasi dilakukan terhadap seluruh BMN eks BMN Idle yang tercatat pada Daftar Barang Pengelola. Inventarisasi dilaksanakan dengan mendaftarkan satu per satu BMN eks BMN idle yang dicatat dalam Daftar Barang Pengelola sekaligus melakukan pengkinian data terhadap identitas dan kondisi BMN terkini atau termuktahir, baik yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang maupun dalam hal terdapat penguasaan pihak lain sehingga mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN eks BMN Idle yang akuntabel.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian IKU Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle

Nama Unit	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Eks BMN Idle							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	25%	55%	55%	88%	88%	100%	100%	
Realisasi	25%	55%	55%	100%	100%	120%	120%	
Capaian	100%	100%	100%	114%	114%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	100	-	-	-	-	120	120
2023	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-

IKU ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis DJKN 2020-2024 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini diantaranya meningkatkan koordinasi dengan satker terkait pendataan BMN Idle pada satker yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi dalam pemanfaatan BMN Idle.

6. Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

a. IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (6a-CP)

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKNP.

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 sebanyak 1.494 BKNP dari target awal sebanyak 2.221 BKNP yang kemudian diaddendum menjadi 2.207 BKNP. IKU ini merupakan IKU minimize dengan target akhir di triwulan IV sebesar 68% dengan raw data target sebanyak 2.207 BKNP.

Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Nama Unit	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKNP)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	98%	90%	90%	81%	81%	68%	68%	
Realisasi	88,32%	88,81%	88,81%	85,83%	85,83%	46,03%	46,03%	
Capaian	108,89%	103,54%	103,54%	94,04%	94,04%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	68	-	100		-	53,97	120
2023	100	-	100		-	174,48	120
2022	100	-	100		-	106,88	106,88
2021	100	-	100		-	189,38	120
2020	100	-	100		-	17,75	17,75

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Renstra Kemenkeu 2020-2024, Renja Kemenkeu 2020-2024, dan Standar Nasional, tidak terdapat standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Action plan yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini adalah dengan terus meningkatkan tahap pengurusan sampai optimal, melakukan penyampaian surat paksa dan melakukan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang, serta melaksanakan penelitian lapangan guna keperluan PSBDT.

b. IKU Persentase Produktivitas Lelang (6b-CP)

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang

Nama Unit	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	
Realisasi	57,63%	58,62%	58,62%	90,52%	90,52%	112%	112%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Persentase Produktivitas Lelang

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	89	-	34		-	112,36	120
2023	80	-	34		-	136,50	120
2022	36	-	34		-	52,65	120
2021	35	-	34		-	46,11	120
2020	34	-	32		-	38,57	113,45

Terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Renstra Kemenkeu 2020-2024, Renja Kemenkeu 2020-2024, dan Standar Nasional, tidak terdapat standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Action plan yang dilakukan untuk meningkatkan IKU Persentase Produktivitas Lelang adalah mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui portal.lelang.go id/ lelang.go.id, edukasi terhadap pengguna jasa, penggalan potensi lelang, serta menyebarkan informasi lelang melalui media sosial resmi KPKNL Jakarta III.

7. Sasaran Strategis 7: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

a. IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (7a-CP)

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian.

Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Capaian Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Nama Unit	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	
Realisasi	1,95%	2,33%	2,33%	1,27%	1,27%	0,94%	0,94%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	16	-	26	-	-	0,94	120
2023	25	-	27	-	-	0,94	120
2022	19	-	28	-	-	2,21	120
2021	22	-	29	-	-	2,55	120
2020	30	-	30	-	-	4,15	120

Terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Renstra Kemenkeu 2020-2024, Renja Kemenkeu 2020-2024, dan Standar Nasional, tidak terdapat standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Action plan atas IKU ini adalah dengan memberikan edukasi kepada pengguna barang terkait besaran nilai usulan permohonan pemanfaatan/penghapusan, serta melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada pengguna barang terkait besaran nilai usulan permohonan.

8. Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

a. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (8a-N)

KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan sebagai IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai. IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat.

KPKNL Jakarta III sangat fokus mendorong pegawainya untuk terus melakukan pengembangan diri melalui diklat, workshop, loka karya, webinar maupun melanjutkan pendidikan. Hal ini agar seluruh pegawai KPKNL Jakarta III dapat memberikan layanan yang terbaik kepada Pengguna Jasa dengan sikap yang sesuai dengan salah satu Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu aspek Profesionalisme.

Capaian jamlat pegawai tahun 2024 sebesar 120% dan kebintalan sebesar 107% dengan rincian periode sebagai berikut.

Capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Nama Unit	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	45%	60%	60%	80%	80%	90%	90%	
Realisasi	64,25%	120%	120%	110%	110%	126%	126%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	90	-	-	-	-	126,10	120
2023	100	-	-	-	-	120	120
2022	100	-	-	-	-	120	120
2021	100	-	-	-	-	114,07	114,07
2020	100	-	-	-	-	120	120

IKU ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis DJKN 2020-2024 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Action plan atas IKU ini diantaranya dengan selalu update memberikan informasi pelatihan pada pegawai dan selalu mendorong pegawai KPKNL Jakarta III untuk mengikuti pelatihan klasikan maupun non klasikal.

b. IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (8b-N)

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Capaian Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Nama Unit	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	
Realisasi	100	98,5	98,5	98,65	98,65	98,49	98,49	
Capaian	118%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Tahun	Target					Realisasi	Capaian
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional		
2024	85	-	-	-	-	98,49	115,87%
2023	80	-	-	-	-	97,83	120%
2022	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-

IKU ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis DJKN 2020-2024 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Action plan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini diantaranya dengan melaksanakan pembahasan manajemen kinerja dan risiko secara berkala yang diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Jakarta III.

9. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

a. IKU Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (9a-CP)

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Pencapaian persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output anggaran belanja KPKNL Jakarta III Tahun 2024 mencapai angka 120% dari target sebesar 100%.

Capaian Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Nama Unit	Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel							
	Indeks kualitas anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	96,41	96,41	96,18	96,18	97,54	97,54	
Capaian	120%	101,48%	101,48%	101%	101%	120%	120%	

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Jakarta III dengan status capaian hijau dikarenakan penyerapan anggaran yang optimal. Tindakan yang telah dilaksanakan adalah dengan memberikan himbuan ke seluruh seksi/subbagian umum serta bidang tugas yang ada untuk segera melakukan kegiatan yang dalam rangka penyerapan anggaran maupun pencapaian output.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Target					Realisasi	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional		
2024	100	-	95%	82,2	-	120	120%
2023	100	-	95%	82,2	-	99,27	99,27%

2022	95,95%	-	95%	81,2	-	95,95%	100,47%
2021	95,5%	-	95%	81,2	-	96,15%	100,68%
2020	95%	-	95%	-	-	92,04%	96,88%

Terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Renja Kemenkeu 2020-2024 dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan Standar Nasional, tidak terdapat standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Action plan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan koordinasi antara subbag umum dengan seluruh seksi dan fungsional dalam hal identifikasi kegiatan yang perlu dilakukan dan penyusunan RPD secara tepat.

b. IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN (9b-CP)

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada KPKNL merupakan:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Tahun 2024 ini KPKNL Jakarta III memiliki target deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10% dan target deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%. Realisasi deviasi Biad PPN dan Biad Lelang tahun 2024 sebesar 0%, dan perolehan capaian sebesar 120%.

Capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Nama Unit	Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel							
	Deviasi Data PNBP Fungsional							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Realisasi	0,11%	0,04%	0,04%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	10	-	-	-	-	0	120
2023	15	-	-	-	-	0,38	120
2022	10	-	-	-	-	3,84	120
2021	12,5	-	-	-	-	0,14	120
2020	-	-	-	-	-	-	-

IKU ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis DJKN 2020-2024 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Action plan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN diantaranya melakukan upaya penginputan seluruh transaksi pelaksanaan lelang pada dropbox dan melakukan penyetoran biad PPN ke kas negara maksimal 1 hari dari tanggal diterimanya setoran selanjutnya menginput biad berikut NTPN pada aplikasi FocusPN.

10. Sasaran Strategis 10: Komunikasi Publik yang Efektif

a. IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (10a-N)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022.

Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Capaian Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Nama Unit	Komunikasi Publik Yang Efektif							
	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	100	100	100	100	100	112	112	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Tahun	Target					Realisasi (%)	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja (%)	Renstra Kemenkeu (%)	Renstra DJKN (%)	Renja Kemenkeu (%)	Standar Nasional (%)		
2024	80	-	-	-	-	112	120
2023	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-

IKU ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis DJKN 2020-2024 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Action plan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU ini diantaranya merespon permohonan informasi publik yang ada sesuai norma waktu berlaku, segera mengupdate informasi publik pada website DJKN sesuai dengan panduan Direktorat Hukum dan Humas, serta menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik kepada pelaksanaan PPID di atasnya tepat waktu.

11. Sasaran Strategis 11: Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

a. IKU Indeks Efektivitas UKI (11a-N)

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini merupakan IKU baru KPKNL Jakarta III yang ada di tahun 2024.

IKU Indeks Efektivitas UKI

Nama Unit	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	Indeks Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5	15	15	20	20	80	80	
Realisasi	5	15	15	20	20	99,06	99,06	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 KPKNL Jakarta III dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja DJKN, dan Standar Nasional (apabila ada) dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU Indeks Efektivitas UKI

Tahun	Target					Realisasi	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional		
2024	82	-	-	-	-	99,06	120%
2023	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-

IKU ini tidak terdapat pada target Rencana Strategis DJKN 2020-2024 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Action plan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU ini diantaranya memperkuat sistem pengendalian internal, seperti membangun lingkungan pengendalian yang baik dan memastikan informasi dan komunikasi berjalan lancar.

B. Kinerja Lainnya

1. Kantor Pelayanan Berkinerja Terbaik Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJKN DKI

KPKNL Jakarta III memperoleh Piagam Penghargaan dari Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai Peringkat Pertama Kantor Pelayanan Berkinerja Terbaik Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,83.

2. Inovasi Kuitansi Lelang Online

Inovasi Kuitansi Lelang Online yang diinisiasi oleh Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta III, Andru Ryvano Abrir. Dengan inovasi ini, Pemenang Lelang tidak perlu datang ke APT KPKNL Jakarta III untuk bermohon kuitansi lelang, cukup dengan mengisi link <https://s.id/KuitansiJakarta3> dan melengkapi data yang diperlukan, Pemenang Lelang dapat mendapatkan kuitansi online secara efektif dan efisien.

3. Replikasi SIKENDI

Permohonan replikasi proses bisnis terkait peminjaman kendaraan dinas hasil inovasi pegawai KPKNL Jakarta III yaitu aplikasi SIKENDI (Surat Ijin Kendaraan Dinas) oleh KPKNL Purwakarta. Permohonan replikasi ini ditujukan pada bulan Maret tahun 2024, sebelum modul peminjaman kendaraan dinas pada satu kementerian diperkenalkan.

4. Lelang Hakordia 2024 Sukses

KPKNL Jakarta III bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses menyelenggarakan Lelang Hakordia Tahun 2024 pada Selasa, 10 Desember 2024 bertempat di Gedung Juang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Dalam lelang tersebut berhasil terjual 79 lot lelang dari 92 lot dengan total nilai Rp18.925.915.000,00. Nilai ini mengalami kenaikan signifikan dari nilai limit awal Rp14.500.934.000,00. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi aktif KPKNL Jakarta III dalam mendukung upaya pemulihan aset (*asset recovery*) dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

5. Lelang Ekekusi Pajak Serentak Pertama Kali di ILingkup Kanwil DJP Jakarta Barat

KPKNL Jakarta III bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta

sukses menyelenggarakan Lelang Eksekusi Pajak Serentak pertama kali di lingkup Kanwil DJP Jakarta Barat pada Rabu, 4 Desember 2024, bertempat di Auditorium Harmoni Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat. Sebanyak 7 objek lelang berupa barang bergerak kendaraan bermotor yang berasal dari Lelang Eksekusi Pajak Serentak berhasil terjual dengan total nilai mencapai Rp532.675.000,00. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan nilai limit awal lelang sebesar Rp385.262.000,00. Melalui kegiatan ini, KPKNL Jakarta III turut serta berkontribusi dalam optimalisasi penerimaan keuangan negara melalui pencapaian penerimaan melalui tindakan penagihan.

6. Kontribusi dalam Lelang UMKM

Dalam rangka mendukung kegiatan Lelang produk UMKM, KPKNL Jakarta III membentuk Tim Lelang UMKM guna mendukung kegiatan yang terkait dengan lelang UMKM. Salah satunya yaitu kegiatan penggalan potensi lelang yang meliputi produk UMKM makanan dan minuman (kopi bubuk, keripik, jamu), kerajinan tangan (mukena, baju, tas, gelang, manik-manik), dan juga bunga potong. Lebih lanjut, terhadap pelaku UMKM yang ada di wilayah Jakarta Barat, Tim Lelang UMKM memberikan sosialisasi tentang apa itu lelang, bagaimana prosedur lelang bagi UMKM, pengenalan Portal Lelang Indonesia portal.lelang.go.id, apa saja manfaat memiliki akun lelang baik sebagai peserta lelang maupun penjual lelang, dan bagaimana cara membuat akun lelang, serta cara membuat permohonan lelang. Adapun realisasi frekuensi Lelang UMKM selama tahun 2024 sebanyak 25 Risaiah Lelang UMKM dari target frekuensi sejumlah 20 Risaiah Lelang, dengan total pokok Lelang UMKM senilai Rp4.350.000,00.

7. Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) KPKNL Jakarta III

Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) KPKNL Jakarta III mengadakan *Talk Show* dengan tema “Jadikan Perempuan Berdaya, dengan Menyapa Lewat Tulisan” dalam rangka memperingati Hari Ibu pada 23 Desember 2024. Kegiatan ini mengundang narasumber salah seorang ibu unggulan sekaligus pengarang buku “Seperti Pulang yang Disambut Datang”, Evi Rahmawati. Kegiatan PUG yang dilakukan secara daring ini, tidak hanya diikuti oleh pegawai KPKNL Jakarta III, tetapi juga terbuka untuk pegawai di unit-unit lainnya, sehingga manfaat yang diperoleh menjangkau *audience* lebih luas.

Dokumentasi Kegiatan

Berita KPKNL Jakarta III



Terima Kasih! KPKNL Jakarta III Meraih NKO Tertinggi di Lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta

Penyerahan Piagam Kantor Pelayanan Berkinerja Terbaik Tahun 2024 di Lingkup Kanwil DJKN DKI Jakarta

A screenshot of a web form titled "KUITANSI ONLINE" for "KPKNL Jakarta III". The form is for "Data Awal Permohonan Penerbitan Kuitansi lelang Jakarta III". It includes a warning about data accuracy, a Google account login option for "elitanursetiari@gmail.com", and two required input fields: "Email" and "Nama Pemenang". The "Nama Pemenang" field has a sub-label "Nama Sesuai User/ID KTP pemenang lelang".

KUITANSI ONLINE
KPKNL Jakarta III

Data Awal Permohonan Penerbitan Kuitansi lelang Jakarta III

Harap dapat memastikan tidak ada kesalahan Data yang diinput, agar tidak menghambat penerbitan dokumen akibat koordinasi yang memakan waktu.

elitanursetiari@gmail.com [Switch account](#) Saving disabled

The name, email, and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form

* Indicates required question

Email *

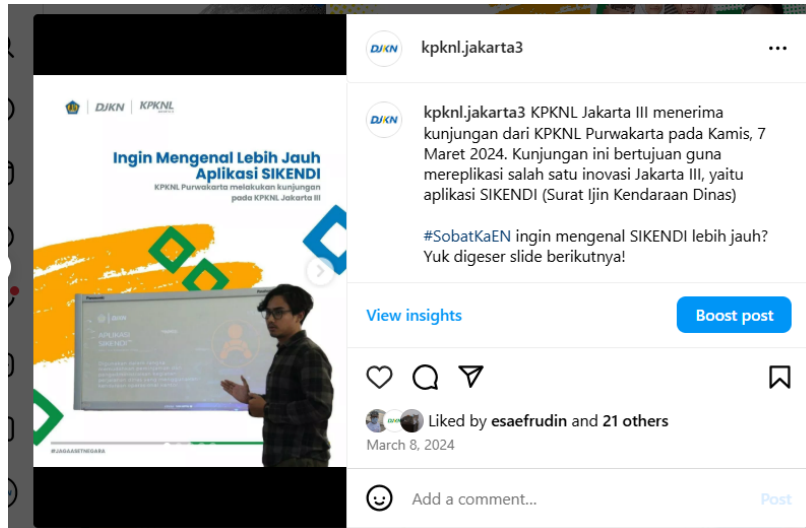
Your email

Nama Pemenang *

Nama Sesuai User/ID KTP pemenang lelang

Your answer

Tampilan Kuitansi Lelang Online KPKNL Jakarta III



Kegiatan Replikasi SIKENDI oleh KPKNL Purwakarta

Berita KPKNL Jakarta III



Lelang Hakordia KPKNL Jakarta III dan KPK Sukses, Rp18 Miliar Disetor untuk Negara

Lelang Hakordia 2024 bersama KPK

Berita KPKNL Jakarta III



Lelang Eksekusi Pajak Serentak, Sukses Wujudkan Sinergi Bersama

Lelang Eksekusi Pajak Serentak Pertama Kali di Lingkup Kanwil DJP Jakarta Barat

Berita KPKNL Jakarta III



KPKNL Jakarta III dan Dekranasda Jakarta Barat Jadikan Portal Lelang Sarana Efektif Memajukan UMKM

Lelang UMKM bersama Dekranasda Jakarta Barat

Instagram Post:

Account: kpknl.jakarta3

Text: kpknl.jakarta3 (23/12) Masih dalam rangka memperingati Hari Ibu, PUG KPKNL Jakarta III pada kegiatan Sapa Pagi pekan ini mengadakan Talk Show dengan tema "Jadikan Perempuan Berdaya, dengan Menyapa Lewat Tulisan."

Narasumber pada kesempatan ini, yaitu seorang salah seorang Ibu unggulan yang memiliki banvak peran. Evi Rahmawati. sekaligus

Engagement: Liked by esaefrudin and 28 others
December 23, 2024

Caption: PUG KPKNL Jakarta III
Jadikan Perempuan Berdaya, dengan Menyapa Lewat Tulisan
Memperingati Hari Ibu 2024

Graphic Text: SEPERTI PULANG YANG DISAMBUT DATANG, EVI RAHMAWATI

Kegiatan PUG dalam rangka memperingati Hari Ibu

C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 KPKNL Jakarta III mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Alokasi anggaran tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPKNL Jakarta III Tahun 2024. Adapun keseluruhan anggaran yang tersedia berjumlah Rp4.269.642.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.680.919.634,00 atau sebesar 86%, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran KPKNL Jakarta III				
Tahun 2024				
No	Program	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Barang	3,549,134,000,00	2,960,658,760,00	83
3	Belanja Modal	720,508,000,00	720,260,874,00	100 (pembulatan)
TOTAL		4.260.642.000,00	3.680.919.634,00	86

Meskipun anggaran tidak terserap 100% tetapi terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Jakarta III Tahun 2024 telah memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III yaitu sebesar 116,83%. Adapun penyerapan anggaran tahun 2024 pada KPKNL Jakarta III dipengaruhi oleh beberapa kondisi, antara lain:

a. Belanja Pegawai

Pagu anggaran belanja pegawai TA 2024 pada KPKNL Jakarta III sebesar Rp0, hal tersebut dikarenakan adanya sentralisasi belanja pegawai sesuai Perdirjen KN Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup DJKN.

b. Belanja Barang

Persentase realisasi belanja barang TA 2024 sebesar 83% atau sebesar 2,960,658,760,00 dari pagu anggaran sebesar Rp3,549,134,000,00.

c. Belanja Modal

Persentase realisasi belanja modal TA 2024 sebesar 100% atau sebesar Rp720,260,874,00 dari pagu anggaran sebesar Rp720,508,000,00.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Jakarta III sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Penyusunan laporan dilakukan untuk mengetahui kinerja organisasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2024, pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan pada KPKNL Jakarta III seluruhnya tercapai dengan hasil yang optimal dan indikator capaian hijau, sehingga di tahun 2024 ini, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III berhasil tercapai sebesar 116,83%.

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Laporan Kinerja 2024 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Jakarta III mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran pengguna barang akan pentingnya pengelolaan kekayaan yang tertib secara administrasi, fisik dan hukum melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara pada pengguna barang.
2. Meningkatkan koordinasi dengan kantor pertanahan dan satuan kerja penatausahaan bidang tanah dalam program pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2025.
3. Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan lelang dan mendorong persepsi positif bahwa lelang merupakan alternatif pelaksanaan jual beli yang mudah, aman, efisien dan menguntungkan.

4. Melaksanakan rekonsiliasi data utang dengan penyerah piutang dalam rangka peningkatan kualitas data saldo piutang yang akurat.
5. Mendorong percepatan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melaksanakan surat paksa, memberikan keringanan hutang dan lelang barang jaminan.
6. Pemantauan terhadap keakuratan data pada aplikasi penunjang seperti SIMAN, SIBANKUM, Fokus PN dan Sistem Informasi Penilaian.
7. Berkoordinasi secara intensif dengan pihak Perbankan dan Balai Lelang terkait pengajuan berkas permohonan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan untuk meningkatkan potensi lelang laku.
8. Mengedukasi Pemohon Lelang tentang Tata Cara Permohonan Lelang guna meminimalisasi permasalahan hukum sebelum dan pasca lelang.
9. Meningkatkan komunikasi dengan para pengguna layanan, menerima kritik dan masukan melalui kuisisioner dalam upaya peningkatan layanan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi KPKNL yang berbasis pada kebutuhan pengguna layanan.
10. Mendorong pegawai untuk membuat inovasi guna menghasilkan output pekerjaan yang lebih cepat, akurat, dan efisien.
11. Mendorong pengembangan kompetensi pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan analisis beban kerja dalam rangka peningkatan kualitas layanan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas.
12. Mewujudkan Keberlangsungan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2025.
13. Berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang Santun, Tertib, Amanah dan Responsif (STAR) sebagai wujud implementasi secara nyata Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) untuk mendukung pencapaian Indonesia Maju.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

KPKNL Jakarta III

Tahun Anggaran 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	112,19%	112,19%
		Indeks integritas	89,17	92,44	103,67%
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	133,27%	120,00%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	72%	87%	120,00%
		Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	87%	94%	108,30%
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100%	137,81%	120,00%
		Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	527,06%	120,00%
4.	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	75	92,89	120,00%
5.	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	126%	120,00%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	173,00%	120,00%
		Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle	100	120	120,00%
6.	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	68%	53,97%	120,00%
		Persentase produktivitas lelang	89%	112,36%	120,00%
7.	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0,94%	120,00%

8.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	126,10%	120,00%
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	98,49	115,87%
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja anggaran	100	120,00	120,00%
		Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0,00%	120,00%
10.	Komunikasi publik yang efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	112,00	120,00%
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	99,06	120,00%

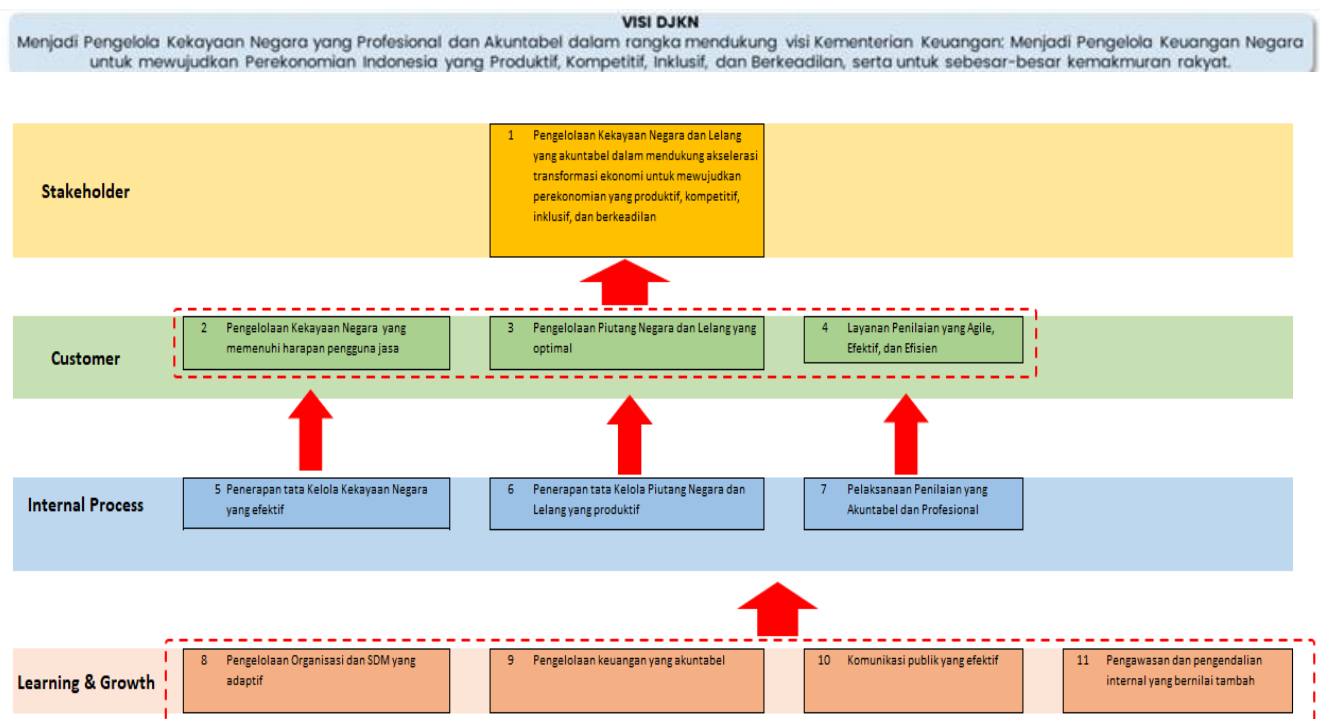
Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp4.269.642.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran program Tahun 2024 : Rp3.680.919.634,00



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-03/WKN.07/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA III
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA III
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.	1a-CP Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp84,1 M)
		1c-CP Indeks integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,5
3	Pengelolaan Putang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (Rp700 M)
		3b-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100 (Rp600 M)
4	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
		5c-N Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo BKPN	68 (2.221)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
		8b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas UKI	82

Program

- | | Anggaran |
|---|------------------|
| 1. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko | Rp 1,880,358,000 |
| 2. Dukungan Manajemen | Rp 2,207,491,000 |

Kegiatan

- | | Anggaran |
|--|------------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp 40,845,000 |
| 2. Pengelolaan Aset | Rp 1,839,513,000 |
| 3. Legislasi dan Litigasi | Rp 59,992,000 |
| 4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp 2,106,007,000 |
| 5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | Rp 21,248,000 |
| 6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp 20,244,000 |

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara DKI Jakarta

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta III



Ditandatangani Secara Elektronik
Mahmudsyah



Ditandatangani Secara Elektronik
Rina Yulia



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA III
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	20	50	50	70	70	100	100
1b-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	45	45	-	45	86,5	86,5
3	Pengelolaan Putang Negara dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase saldo BKPN	96	90	90	81	81	68	68
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi publik yang efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Jakarta III,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rina Yulia



SASARAN KINERJA PEGAWAI

PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 01 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Rina Yulia	NAMA	Mahmudsyah	
NIP	197001041996032001	NIP	196407161991031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100	Stakeholder
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Stakeholder

	mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)			
3	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks integritas	89,17	Stakeholder
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	Customer
5	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,5	Customer

	DKI Jakarta)			
6	Pengelolaan Putang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Customer
7	Pengelolaan Putang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Customer
8	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Customer
9	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Internal Process
10	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Internal Process

	DKI Jakarta)			
11	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100	Internal Process
12	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase saldo BKPN	68	Internal Process
13	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase produktivitas lelang	80	Internal Process
14	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	16	Internal Process
15	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Learning and Growth

16	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	Learning and Growth
17	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Learning and Growth
18	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	Learning and Growth
19	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Learning and Growth
20	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks efektivitas UKI	82	Learning and Growth

B. TAMBAHAN

--	--	--	--	--

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>

PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus- menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>

PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Rina Yulia
197001041996032001



Ditandatangani secara elektronik

Mahmudsyah
196407161991031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 01 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	40 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain 14omputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	20	50	50	70	70	100	100
2	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
4	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
5	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik	-	45	45	-	45	86,5	86,5

6	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
9	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
10	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
11	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100
12	Persentase saldo BKPN	96	90	90	81	81	68	68
13	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
14	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16

15	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
16	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
17	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
18	Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
19	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
20	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
	TAMBAHAN							
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Mahmudsyah
196407161991031001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Rina Yulia
197001041996032001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 03A/WKN.07/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-03/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100	5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle	100
2.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
1c-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1c-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan	30	50	50	60	60	71,5	71,5

	BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan									BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
2b-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	45	45	-	45	86,5	86,5	2b-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	10	45	45	60	60	86,5	86,5
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100	5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	88	88	100	100
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90	8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45	60	60	80	80	90	90
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82

Jakarta, 31 Mei 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta,



Ditandatangani secara elektronik
Mahmudsyah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III,



Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100	Stakeholder
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	Stakeholder
3.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks integritas	89.17	Stakeholder

4.	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5	<i>Customer</i>
5.	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86.5	<i>Customer</i>
6.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase realisasi pokok lelang	100	<i>Customer</i>
7.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	<i>Customer</i>
8.	Layanan Penilaian yang agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan Penilaian	75	<i>Customer</i>
9.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	<i>Internal Process</i>
10.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	<i>Internal Process</i>
11.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100	<i>Internal Process</i>

12.	Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	45	<i>Internal Process</i>
13.	Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase produktivitas lelang	89	<i>Internal Process</i>
14.	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	<i>Internal Process</i>
15.	Pengelolaan organisasi dan SDM adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	<i>Learning & Growth</i>
16.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90	<i>Learning & Growth</i>
17.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeksi kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	<i>Learning & Growth</i>
18.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	<i>Learning & Growth</i>
19.	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	<i>Learning & Growth</i>

20.	Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks efektivitas UKI	82	<i>Learning & Growth</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks integritas	89.17	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5	Penerima Layanan

5.	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86.5	Penerima Layanan
6.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase realisasi pokok lelang	100	Penerima Layanan
7.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan
8.	Layanan Penilaian yang agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
9.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
10.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
11.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle	100	Proses Bisnis
12.	Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	45	Proses Bisnis

13.	Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase produktivitas lelang	89	Proses Bisnis
14.	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	Proses Bisnis
15.	Pengelolaan organisasi dan SDM adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Proses Bisnis
16.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks efektivitas UKI	82	Penguatan Internal atau Anggaran

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt .1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt .1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2.	Indeks integritas	-	-	-	-	60	89.17	89.17	2.	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89.17	89.17
4.	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71.5	71,5	4.	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71.5	71,5
5.	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86.5	86.5	5.	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86.5	86.5
9.	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	9.	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
11.	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100	11.	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle	25	55	55	88	88	100	100
16.	Persentase Pengembangan	10	60	60	75	75	90	90	16.	Persentase Pengembangan	45	60	60	80	80	90	90

	Kompetensi Pegawai									Kompetensi Pegawai							
17.	Indeksi kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	17.	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
20.	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	20.	Indeks efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia

Jakarta, 30 Mei 2024

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Mahmudsyah



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 03B/WKN.07/2024

Pada hari ini, telah disepakati addendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-03/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen addendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-03A/WKN.07/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

		Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
3	Pengelolaan Putang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (700 M)	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (716,4 M)
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase saldo BKPN	68 (2.221 Berkas)*	6a-CP	Persentase saldo BKPN	68 (2.207 Berkas)

*)Catatan: Berdasarkan PK-03/WKN.07/2024 dan PK-03A/WKN.07/2024 raw data target saldo BKPN adalah 2.221 BKPN, sedangkan pada ND Seditjen Nomor ND-4213/KN.1/2024 adalah 2.207 BKPN.

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jakarta, 18 November 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III



Ditandatangani secara elektronik
Arif Bintarto Yuwono



Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
6	Pengelolaan Putang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase realisasi pokok lelang	100 (700 M)	<i>Penerima Layanan</i>
12	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase saldo BKPN	68 (2.221 Berkas)	<i>Proses Bisnis</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
6	Pengelolaan Putang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase realisasi pokok lelang	100 (716,4 M)	<i>Penerima Layanan</i>
12	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase saldo BKPN	68 (2.207 Berkas)	<i>Proses Bisnis</i>

*)Catatan: Berdasarkan PK-03/WKN.07/2024 dan PK-03A/WKN.07/2024 raw data target saldo BKPN adalah 2.221 BKPN, sedangkan pada ND Seditjen Nomor ND-4213/KN.1/2024 adalah 2.207 BKPN.

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jakarta, 18 November 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia



Ditandatangani secara elektronik
Arif Bintarto Yuwono